

# KOMODITAS KEDELAI DALAM HEGEMONI EKONOMI NEOLIBERALISME (Studi Kasus Tata Produksi dan Tata Niaga Kedelai di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah)

Cike Sitaresmi

## **Abstract**

*Neoliberalism has been secured through the policies of the Bretton Woods institutions , the IMF ,the World Bank and the World Trade Organization (WTO). Hegemony economic and political factors produced the emergence of a neoliberal regime with a predatory capitalist oligarchy playing an ever greater role in Indonesian agriculture,especially soybean commodity. This thesis also describes the relationship of agricultural policy with the soybean self-sufficiency in terms of the flood of imported soybeans. . This research using qualitative methods, writer take the location of research in Grobogan Regency as a representation of the neoliberal economic hegemony in soybean commodity. Grobogan Regency known as the center of soybean production in Central Java but in fact Grobogan Regency is not self-sufficient in soybeans and fall in the soybean imports trapped.*

*Keywords: neoliberalism , hegemony, soybean commodity, self sufficient*

## **A.PENDAHULUAN**

Era reformasi, UUD 1945 ditandai dengan adanya perubahan (amandemen). Pengusung orde reformasi menuntut perubahan UUD 1945 antara lain karena adanya anggapan bahwa Orde Baru melakukan sikap multi tafsir terhadap UUD 1945. Paling menarik dicermati adalah adanya amandemen UUD 1945 pada pasal 33, di mana terdapat tambahan ayat, yaitu pada ayat 4 dan 5:

- 4).perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5).ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. (Wikipedia.<http://id..org/wiki/ UUD 1945>)

Melihat ayat 4 rumusan amandemen , secara eksplisit terlihat adanya paham persaingan pasar bebas , ini mengakibatkan sistem ekonomi kerakyatan bergeser menjadi pasar sosial (*social market economy*). Hak milik pribadi ataupun hak-hak individu lainnya serta efisiensi sebagai salah satu pilar ekonomi pasar global masuk dalam konstitusi. Amandemen pasal 33 pada ayat 4 ini seakan mengingkari prinsip di mana perekonomian disusun secara prinsip demokrasi ekonomi kerakyatan.

Amandemen pasal 33 memperlihatkan bahwa prinsip kapitalisme mulai diakomodir meskipun wama sosial dari ekonomi Indonesia juga amat kental, seperti dapat dilihat dari berbagai pasal dan ayat yang ada. Indonesia mengalami kemerosotan ekonomi sejak krisis ekonomi, daya saing sektor industri juga mengalami banyak hambatan. Apalagi pasar bebas yang juga menjadi komitmen Indonesia baik melalui WTO (*World Trade Organization*) membuat ekonomi Indonesia semakin terbuka dan persaingan meningkat. Pasar Indonesia sendiri mulai dibanjiri produk impor, padahal pangsa pasar kita di luar negeri juga rendah daya saingnya. (Adiningsih dalam Soesastro, 2005:26-30) .

Pada era globalisasi, menghadapi persaingan global, *image building* atau *nation branding* seharusnya menjadi agenda nasional. Kekuatan politik, menurut Joseph Nye dalam Aleksius Jemadu, tidak selalu dipengaruhi oleh *hard power politic* seperti kekuatan militer dan basis industri suatu negara saja tetapi juga melalui *soft power*. Konsep *soft power* diartikan sebagai kekuatan nasional yang didasarkan pada ideologi, nilai-nilai, dan ciri-ciri budaya yang secara konkrit diperlihatkan melalui kebijakan dan perilaku negara atau produk-produk seperti musik, film, makanan yang dikonsumsi secara luas. Bahkan Amerika Serikat sebagai negara adidaya juga melengkapi *hard power* nya dengan *soft power* untuk mempertahankan dan memperluas pengaruhnya (Jemadu, 2008:117-118).

Dalam konteks *soft power*, pangan adalah kekuatan politik suatu bangsa. Menurut UU RI nomor 7 tahun 1996 tentang pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan hak asasi bagi setiap individu di Indonesia. Konsep pangan ini dipertegas lagi dalam UU RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945, dan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata.

Terpenuhinya ketersediaan pangan, pertanian adalah salah satu pilar utama pembangunan untuk mencukupi kebutuhan pokok hidup semua orang. Masalah utama yang berkaitan dengan kemandirian pangan adalah problem pemenuhan gizi masyarakat, meskipun Indonesia telah memasuki era globalisasi berita tentang busung lapar, *malnutrisi* pada balita masih menjadi berita sehari-hari. Kedelai sebagai salah satu komoditas pangan strategis ternyata memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Nilai protein kedelai jika difermentasi dan dimasak akan memiliki mutu yang lebih baik dari jenis kacang-kacangan lain. Kedelai sebagai salah satu alternatif untuk menggantikan protein hewani yang relatif lebih mahal. Selain itu, kedelai juga dipercaya bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah serta mencegah timbulnya penyakit jantung. (Cahyadi, 2007:2-7).

Kedelai tidak hanya bernilai ekonomis, namun produk olahannya seperti tahu dan tempe adalah pangan bernilai kultural. Gonjang ganjing masalah impor kedelai telah menyita perhatian kita, dalam beberapa tahun terakhir ini tercatat lebih dari tiga kali lonjakan harga kedelai. Setiap krisis kedelai, tidak pernah ada solusi yang menjanjikan, hanya solusi jangka pendek untuk menenangkan masyarakat dan produsen. Persoalan mendasar untuk mengelola tataniaga dan membangun swasembada kedelai tidak pernah terwujud.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam sembilan bulan pertama tahun 2013 (Januari-September), impor bahan baku tahu dan tempe ini mencapai 1,2 juta ton atau US\$ 748,5 juta atau setara Rp 7,48 triliun. Negara pemasok terbesar kedelai ke dalam negeri adalah Amerika Serikat, total impor (Januari-September) dari Amerika Serikat adalah 1,1 juta ton atau US\$ 678,3 juta. (finance.detik.com). Setiap kali krisis kedelai, pemerintah hanya melakukan perubahan tarif impor bahkan yang terakhir penghapusan bea impor, kebijakan ini hanya bisa mengatasi krisis pasokan dan meredam lonjakan harga untuk sementara. Kebijakan penghapusan tarif impor suatu tindakan yang melanggar upaya pencapaian kedaulatan dan kemandirian pangan seperti yang termaktub dalam UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pihak yang

diuntungkan selalu hanyalah importir, petani kedelai lokal yang memproduksi sekitar 30 persen kebutuhan nasional justru mengalami proses pemiskinan.

Penghapusan bea impor juga dimaknai Indonesia makin terikat dalam jaring kapitalisme global yang dimainkan negara-negara maju dalam “perangkap pangan” (*food trap*) impor. Akibat dari adanya perdagangan bebas yang selama ini dianut oleh pemerintah Indonesia, ketergantungan terhadap kedelai impor tidak lepas dari perjanjian pertanian internasional yang digagas oleh badan perdagangan dunia, yaitu WTO. Salah satu bentuk perjanjian WTO adalah pengaturan perdagangan kedelai dan komoditas pertanian utama lainnya yang diatur dalam kerjasama multilateral yang diwujudkan oleh WTO dalam bentuk perjanjian pertanian *Agreement on Agriculture* (AoA). Tujuannya adalah reformasi kebijakan perdagangan di bidang pertanian, dalam rangka menciptakan suatu sistem perdagangan pertanian yang adil dan berorientasi pasar. Program reformasi ini berisi komitmen-komitmen spesifik untuk mengurangi subsidi domestik, subsidi ekspor, dan yang paling utama adalah adanya liberalisasi penuh perdagangan. Seperti ditekankan pada lembar AoA (wto.org) :

*Having agreed that in implementing their commitments on market access, developed country members would take fully into account the particular needs and conditions of developing country members by providing for a greater improvement of opportunities and terms of access for agricultural products of particular interest to these Members, including the fullest liberalization of trade in tropical agricultural products as agreed at the Mid-Term Review*

Liberalisasi pertanian ini semakin nyata, ketika tahun 1998 pemerintah menandatangani kesepakatan dengan IMF (*International Monetary Found*) dalam bentuk Lol (*Letter of Intent*). Salah satu kesepakatan yang dibuat adalah berkurangnya peran Bulog, di mana komoditas yang dikelola Bulog dikurangi dan tinggal beras dan gula. Pada masa Orde Baru, sebagai pengontrol tata niaga pangan di Indonesia, pemerintah masih memberlakukan impor terbatas (kuota), sehingga tidak semua industri menggunakan kedelai impor. Bulog adalah penyalur kedelai impor ke KOPTI (Koperasi Tahu dan Tempe Indonesia), KPKD (Kelompok Pedagang Kacang Kedelaidan Industri Pengolah Pangan. Dengan mengacu Lol dengan IMF pasar kedelai dibebaskan pada pasar dan tarif impor dibuat seminimal mungkin bahkan bila fluktuasi harga tidak menentu, pemerintah memberlakukan tarif impor hingga 0 persen.

Dalam upaya menuju swasembada kedelai, terdapat kenyataan yang tidak bisa dielakkan, peningkatan produksi kedelai tidak mampu mengimbangi laju konsumsi sehingga mau tidak mau Indonesia masih saja mengimpor meskipun kualitas kedelai kita jauh lebih unggul. Kondisi ini dikarenakan Indonesia terjerat hegemoni rezim neoliberal. Ini nampak nyata pada kuatnya MNC (*Multi National Corporations*) produk biji-bijian yang menguasai pangsa pasar dunia seperti Cargill dan Monsanto yang juga telah masuk dalam pertanian kita. Pertumbuhan ekonomi dunia dengan globalisasi memberikan peluang tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional, korporat yang mengendalikan ekonomi dunia.

Teori stabilitas hegemoni (*Hegemonic Stability Theory*) menyatakan bahwa stabilitas perekonomian dunia dapat tercipta jika ada satu kekuatan *hegemonic* di mana kekuatan ekonomi dan militer sulit diimbangi negara manapun (Hadiwinata 1993 dalam Hadiwinata : 2013:46). Krisis ekonomi global akhir 1990 an telah menyeret Indonesia dalam hegemoni neoliberalisme. Ketergantungan Indonesia

pada IMF memaksa Indonesia mengikuti paradigma ekonomi baru yang diciptakan *Washington Consensus*. Paradigma ini kemudian sering disebut sebagai praktek neoliberalisme di Indonesia. Sebuah paham yang pada dasarnya adalah kebangkitan kembali paham pasar bebas dan globalisasi ekonomi (Rahardjo, 2012:12).

Pendekatan pasar bebas ibaratnya mendukung filsafat sosial model Darwin di mana setiap orang hidup untuk dirinya sendiri, perusahaan untuk perusahaan itu sendiri begitu pula negara, hanya *concern* pada kebutuhan negaranya. Dalam kerangka hukum rimba seperti ini, dimungkinkan kebebasan mendapatkan akses pasar dan mencari laba sebesar-besarnya. Paradigma ini ini mendukung pemenang dan tidak ada kompensasi kerugian bagi pihak yang kalah (Khor, 2001: 32). Lemahnya Indonesia dalam jerat kapitalisme global membuat kebijakan dan perundang-undangan dibuat hanya untuk mengakomodir keinginan investor global, sehingga secara kasar dikatakan terjadinya “pengambil alihan” negara oleh MNC. Negara dikerdilkan sehingga perannya hanya menjadi “centeng” MNC (Wibowo, 2010: 246).

Melihat permasalahan di atas diperlukan suatu kebijakan ekonomi politik yang berbasiskan kerakyatan. Dalam konteks penelitian ini, adanya *double standard* dalam lembaga perdagangan dunia yang didukung kuatnya MNC dalam impor kedelai, menandai adanya peranan komunitas epistemik neoliberalisme bagi beroperasinya korporasi multinasional yang menghegemoni kedaulatan pangan kita, khususnya kedelai. Kebijakan pertanian dalam negeri seharusnya mengacu pada asas kemandirian ekonomi yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945, sehingga negara kita memiliki kemampuan berswasembada pangan yang berarti pula berdaulat atas pangan. Swasembada kedelai adalah contoh dari kedaulatan pangan yang terhegemoni, karena nilai impor setiap tahun negara kita sangat fantastis, sementara produksi kedelai lokal tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri

Sejak Indonesia masuk dalam jerat ekonomi neoliberalisme, produktivitas kedelai selalu menurun, akhirnya dari negara produsen kedelai Indonesia menjadi negara pengimpor kedelai. Kondisi ironis ini harus segera diatasi, agar produktivitas kedelai meningkat dan cita-cita swasembada kedelai tercapai. Swasembada kedelai sangat diperlukan karena implikasinya adalah kedaulatan pangan. Swasembada kedelai bisa dimulai dari daerah-daerah bila pemerintah memiliki keinginan kuat untuk lepas dari jerat hegemoni ekonomi neoliberalisme. Kabupaten Grobogan menjadi lokasi penelitian, karena Kabupaten Grobogan merupakan daerah sentra kedelai dan menjadi *pilot project* swasembada kedelai. Kabupaten Grobogan adalah penghasil kedelai terbesar di Provinsi Jawa Tengah, daerah ini juga memiliki varietas kedelai unggulan yaitu varietas Grobogan. Varietas Grobogan ternyata memiliki kualitas yang tidak kalah dari kedelai impor. Kabupaten Grobogan adalah representasi dimana penetrasi neoliberalisme pada kebijakan pemerintah khususnya kebijakan pertanian yang menyangkut kedaulatan pangan, mengakibatkan daerah sentra kedelai ini masih belum mampu lepas dari jerat impor kedelai.

## **A.1.TINJAUAN LITERATUR**

### **1.Ekonomi Politik dan Perdagangan Internasional**

Ekonomi politik international berhubungan dengan peranan pasar global dan selalu dikaitkan dengan peranan perusahaan-perusahaan multinasional. Memandang besarnya peran MNC dalam ekonomi politik dunia, maka yang ada

adalah dua pemikiran yang berseberangan. Di satu sisi menganggap bahwa peran MNC meningkat pesat, di sisi lain negara-sentris beranggapan bahwa besarnya dampak dari globalisasi terlalu dilebih-lebihkan, maka negara hendaknya tetap memegang peranan penting dimana kekuasaan negara tetap dapat mengendalikan kekuasaan perusahaan-perusahaan multinasional. Dalam menghadapi hubungan Negara dan ekonomi politik global, Gilpin berpandangan (2001:18):

*I define "global political economy" as the interaction of the market and such powerful actors as states, multinational firms, and international organizations. The Political Economy of International Relations, although both take a state-centric approach to the subject While I do assume that the territorial state continues to be the primary actor in both domestic and international economic affairs, I do not contend that the state is the only important actor. Other significant players include the World Bank, the International Monetary Fund (IMF), and the Commission of the European Union. Despite the importance of these other actors, however, I emphasize that national governments still make the primary decisions regarding economic matters; they continue to set the rules within which other actors function, and they use their considerable power to influence economic outcomes.*

(Saya mendefinisikan "ekonomi politik global" sebagai interaksi pasar dan aktor kuat seperti negara, perusahaan-perusahaan multinasional, dan organisasi internasional. Ekonomi Politik dari Hubungan Internasional, meskipun keduanya mengambil subyek pendekatan pada *state centric*. Saya pribadi menganggap bahwa negara teritorial dapat terus menjadi aktor utama dalam urusan ekonomi baik domestik maupun internasional, saya tidak berpendapat bahwa negara adalah satu-satunya aktor utama, karena ada pemain penting lainnya termasuk Bank Dunia, *Moneter Internasional Fund* (IMF), dan Komisi Uni Eropa. Meskipun aktor-aktor lain juga penting, bagaimanapun, saya menekankan bahwa keputusan utama mengenai masalah-masalah ekonomi harus dibuat oleh pemerintahan suatu negara, mereka harus terus menetapkan aturan di mana aktor-aktor lain juga tetap berfungsi, dan mereka menggunakan kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi perekonomian)

## **2. Konsep Hegemoni**

Konsep hegemoni menurut Gramsci adalah sesuatu yang kompleks. Gramsci menggunakan konsep ini untuk meneliti bentuk-bentuk ideologis, politis, kultural, dalam sebuah tatanan masyarakat dimana suatu kelas tertentu memimpin dengan cara paksaan. Penafsiran Gramsci tentang negara adalah sesuatu yang kompleks mencakup aktivitas-aktivitas teoretis dan praktis di mana kelas penguasa tidak hanya mampu membenarkan dan mempertahankan dominasinya, melainkan juga mendapatkan persetujuan dari mereka yang diperintah. Negara dalam perspektif Gramsci ini tidak hanya menyangkut aparat-aparat pemerintahan, melainkan juga hegemoni dari masyarakat sipil (Faruk, 2005: 62-77)

Robert Keohane (Keohane, 1984:135-140) menyatakan bahwa untuk menjelaskan ekonomi politik internasional diperlukan suatu konsep suatu kekuasaan dari suatu rezim internasional yang memiliki kekuatan hegemoni. Menurut Keohane sesudah perang dunia kedua, Amerika Serikat menjadi pemimpin ekonomi politik dunia, negara yang bekerjasama dengan Amerika Serikat memiliki tiga keuntungan : 1) *stable international monetary system*; 2) *provision of open markets for goods*; 3)

*access to oil at stable prices* (sistem moneter internasional yang stabil, penyediaan pasar terbuka bagi barang - barang, stabilitas harga minyak).

### **3. Neoliberalisme**

Neoliberalisme sebagai wujud baru dari perkembangan liberalisme. Fase ini tumbuh dan berkembang pesat ketika terjadi kegagalan atas penerapan ekonomi neoklasik. dimana adanya regulasi dari negara, kuatnya dominasi pemerintah dalam sistem ekonomi. Kembalinya paham liberalisme dalam wujud neoliberalisme berarti peran negara dipersempit dengan sendirinya.

Kapitalisme juga menjadi acuan dalam ideologi pembangunanisme era Orde Baru, yang dampak buruknya masih dirasakan pada era ini. Faham pembangunan adalah versi Negara Dunia Ketiga (termasuk Indonesia) dari faham negara kesejahteraan atau Keynesianisme. Formulasi faham tersebut pada dasarnya dibuat bagi kepentingan kapitalisme internasional. Suatu hal yang wajar jika timbul kecurigaan pada ekonom pro liberal tentang kehancuran perekonomian Indonesia di penghujung era Orde Baru, banyak dari pendapat mereka memperlihatkan sikap pro kebijakan neoliberal. Pendapat mereka tentang penyebab krisis Indonesia bukannya karena perekonomian Indonesia terlampaui terintegrasi kepada tatanan kapitalisme dunia, malah hasil analisis yang disodorkan adalah karena perekonomian Indonesia kurang kapitalis. Mereka menyodorkan solusi bahwa ekonomi kita harus lebih pro pasar bebas, serta lebih terbuka dengan pihak asing, dalam semua aspek perekonomian. Tidak cukup hanya terbuka dalam ekspor impor, melainkan juga dalam hal arus keluar masuk modal (Rizky *et al*, 2008 : 22-23).

#### **A.2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sebab penulis berpendapat bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis suatu permasalahan, data yang diambil tidak hanya terfokus pada hitungan angka-angka seperti penelitian kuantitatif. Data statistik atau bentuk hitungan atau angka-angka hanya dipakai sebagai data sekunder untuk melihat kondisi riil suatu permasalahan. Data sekunder ditambah dengan hasil *depth interview* tersebut kemudian dipakai untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan tentang pengaruh hegemoni neoliberalisme dalam produktivitas komoditas kedelai.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Penetrasi rezim neoliberal**

Pada awal pendiriannya, krisis ekonomi akibat perang dunia dan *great depression*, konsep ekonomi yang digagas di Bretton Wood mengikuti bentuk ekonomi Keynesian yang digagas oleh John Maynard Keynes. Aliran Ekonomi Keynesian menyatakan *The end of laizess faire* dan menaruh sebuah kerangka teori bagi formulasi ekonomi tentang pentingnya kontrol negara terhadap pasar. Tahun 70 an dan 80 an dalam tataran ekonomi politik global terjadi krisis minyak akibat embargo minyak dari negara-negara di Timur Tengah kepada Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Krisis minyak ini berdampak pada krisis ekonomi, akibatnya pada situasi tersebut muncul kembali ide liberalisme, tidak hanya di tingkat nasional dalam negeri tapi juga di tingkat global di IMF dan World Bank.

Di Inggris, Margaret Thatcher mengancam campur tangan negara sebagai biang keladi merosotnya pertumbuhan ekonomi, inflasi dan defisit anggaran belanja. Di Amerika Serikat, Ronald Reagan pada saat yang sama juga melakukan kebijakan privatisasi. Reagan dan Thatcher percaya bahwa industri layanan publik akan lebih

efisien diserahkan kepada swasta, akibatnya birokrasi dan regulasi yang tidak efisien dihapus. Munculnya istilah "Thatcherisme" dan "Reaganomics" ini sering diidentikkan dengan istilah "deregulasi" dan "debirokratisasi". (Deliarnov, 2006:167-168)

Wacana pelimpahan otoritas regulatif dari tangan negara ke tangan individu, privatisasi dan pasar bebas disuarakan kelompok neo-konservatif, sebuah aliran politik yang mengagungkan peran pasar secara mutlak dalam mekanisme ekonomi, baik pada level nasional maupun global. Madzhab ini yang kemudian dikenal dengan paham neoliberal. Kembalinya paham liberalisme klasik dalam wajah baru.

Neoliberalisme semakin menjadi paradigma pembangunan yang dominan pada tahun 1980-an dan 1990-an menggantikan paradigma Keynesian dalam pembangunan ekonomi yang dianut oleh sebagian besar negara-negara berkembang. Ketika "*Washington Consensus*" dirancang, peran neoliberalisme semakin menguat. *Washington Consensus* dibuat sebagai respon terhadap persoalan ekonomi negara-negara Amerika Latin yang menerapkan paradigma Keynesian. Krisis ekonomi di Negara Amerika Latin ini diyakini oleh padangan neoliberal sebagai dampak dari kerugian pemerintah akibat proteksi yang diberlakukan pemerintah kepada perusahaan pemerintah yang tidak efisien dan merugi, sehingga pada akhirnya perusahaan swasta memaksa konsumen untuk membayarkan harga mahal, adanya kebijakan moneter yang sangat longgar yang menyebabkan laju inflasi tidak terkendali. Penerapan paham neoliberal dengan *Washington Consensus* ditandai dengan adanya tiga pilar kebijakan fiskal, privatisasi dan penerapan pasar bebas (Joseph Stiglitz, 2003:53)

Runtuhnya sistem Bretton Woods tidak serta merta menjadikan lembaga yang dibesarkannya menjadi ambruk. Justru lembaga hasil Bretton Woods semakin menjadi lembaga penjaga gawang neoliberal. Apalagi sejak GATT berubah nama menjadi lembaga perdagangan dunia (WTO) pada tanggal 1 Januari tahun 1995. Peet (2003) menamakan tiga lembaga hasil Bretton Woods; World Bank, IMF dan WTO sebagai *unholy trinity*. Penetrasi lembaga keuangan dunia seperti World Bank pada negara-negara berkembang tercipta dalam bentuk 'Kebijakan Penyesuaian Struktural (*Structural Adjustment Policy/SAP*), yang fokus pada kebijakan makro ekonomi dan reformasi institusi. Ketika World Bank dipimpin McNamara menjadi awal penerapan pinjaman penyesuaian struktural (*structural adjustment lending*) untuk mempromosikan orientasi ekspor dan liberalisasi dagang dalam program pinjaman Bank yang diberlakukan pada setiap negara yang menerima bantuan terutama untuk negara-negara ekonomi menengah (Peet, 2003: 121).

Penetrasi dalam perdagangan Internasional (WTO) dilakukan melalui World Bank dan IMF melalui serangkaian kebijakan sebagai dampak dari program penyesuaian struktural (*structural adjustment*) yang seringkali menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan pinjaman. WTO menerapkan kebijakan liberalisasi perdagangan terutama menghilangkan pembatasan impor non-tarif (*non-tariff import barriers*). Kebijakan WTO ini tidak lepas dari pengaruh MNC. Menurut Peet (2003:200-203), MNC melakukan penetrasi pada institusi internasional, WTO, IMF dan World Bank, pada awalnya organisasi-organisasi ini dirancang untuk menjadi lembaga perdagangan yang mengatasi sengketa dan memperbaiki ekonomi dunia, namun dalam perjalannya, kebijakan-kebijakan tiga organisasi ini mengabdikan kepada kepentingan korporat, adanya "*Washington-Wall Street Alliance*".

Bertepatan dengan berdirinya WTO di tahun 1995, Indonesia menyepakati *Agreement on Agriculture*. Indonesia wajib meliberalisasi sektor pertanian domestik. Beragam kebijakan neoliberal diimplementasikan terhadap sektor pertanian Indonesia, seperti pengurangan subsidi pupuk, pencabutan status BULOG sebagai perusahaan negara, dibukanya peran investasi asing untuk memasuki pasar domestik. Perjanjian WTO tentang pertanian (AoA) mendukung kebijakan World Bank dan IMF dengan melarang pembatasan non tarif serta mengharuskan negara berkembang menurunkan harga rata-rata produk pertanian sebesar 24% selama kurun waktu 1995-2004. Bahkan kini dalam kasus Indonesia, ketergantungan Indonesia terhadap produk pertanian asing menjadi semakin kuat.

Pada era orde baru dengan segala kekurangannya, kita memang harus mengakui, pertanian mendapat prioritas dalam pembangunan ekonomi Soeharto. Pertanian ditunjang dengan infrastruktur seperti membangun pabrik-pabrik pupuk. Manajemen usaha tani digalakkan dengan Panca Usaha Tani, Bimas, Operasi Khusus, dan Intensifikasi Khusus yang terbukti mampu meningkatkan produksi pangan, terutama beras, bahkan para petani dimodali dengan kemudahan memperoleh kredit bank. Pemasaran hasil panen mereka dijamin dengan kebijakan harga dasar dan pengadaan pangan oleh BULOG. Namun sejak menandatangani *Letter of Intent* dengan IMF, BULOG dilucuti perannya sebagai penyangga pangan nasional, pertanian kita digempur oleh korporat asing yang memiliki modal besar. Contohnya produksi dan distribusi pupuk domestik dikuasai oleh korporasi transnasional raksasa seperti Monsanto dan Syngenta. Bahkan ketika Indonesia pada tahun 1992 sempat berswasembada kedelai, kini pemenuhan kebutuhan kedelai sangat tergantung pada impor, fluktuasi harga kedelai hanya menjadi ajang saling kecam para elit politik tanpa ada solusi permanen.

## **2. Komoditas kedelai Grobogan dalam jerat ekonomi neoliberalisme**

Kabupaten Grobogan, pada tahun 2012 dinobatkan sebagai sentra penghasil kedelai, bahkan varietasnya sudah diakui secara nasional sebagai bibit yang berkualitas tinggi. Pemerintah Kabupaten Grobogan juga merencanakan mendirikan Rumah Kedelai (RKG) sebagai wadah pengembangan produktivitas kedelai dan membuat varietas kedelai unggulan. Menurut Kepala Badan Litbang Kementerian Pertanian Haryono kedelai Grobogan mempunyai varietas kedelai terbaik di dunia. Selain itu menurut Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, Kabupaten Grobogan merupakan penyuplai terbesar kedelai di Jawa Tengah yakni mencapai 43,15% dan secara nasional sebanyak 7,72% dengan produksi rata-rata 65.755 ton dari luas lahan sebanyak 27.170 hektare. (<http://www.metrotvnews.com/>)

Potensi komoditas kedelai Kabupaten Grobogan yang begitu menjajikan nyatanya Kabupaten Grobogan sebagai daerah sentra kedelai belum mampu lepas dari jerat ekonomi neoliberalisme, cita-cita swasembada kedelai masih belum terlaksana. Pada tata produksi, meskipun Kabupaten Grobogan adalah daerah yang memiliki Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Kedelai tertinggi tahun 2012 se Provinsi Jawa Tengah, namun luas panen dan produksi data series 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa luas panen dan produksi kedelai di Kabupaten Grobogan cenderung mengalami penurunan, fluktuatif atau tidak stabil, ini terlihat pada data tabel di bawah ini :



**Luas panen dan produksi kedelai di Kabupaten Grobogan dan Jawa Tengah  
Tahun 2009-2013**

Uraian		2009	2010	2011	2012	2013
Kab. Grobogan	LP (Ha)	18.604	31.891	7.350	27.170	15.606
	Prov	24,34	23,82	20,27	23,97	18,57
	(Ton/Ha)	45.289	75.979	14.899	65.114	28.975
	Prod (Ton)					
Jawa Tengah	LP (Ha)	110.061	114.070	81.988	97.112	65.278
	Prov	15,91	16,48	13,69	15,69	15,21
	(Ton/Ha)	175.156	187.992	112.273	152.416	99.318
	Prod (Ton)					

Sumber : Dinas Pertanian TPH Kab Grobogan dan Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah (2014)

Luas Lahan panen kedelai dan produksi menunjukkan data yang fluktuatif atau tidak stabil. Penurunan luas lahan dan produksi dari tahun 2012 ke tahun 2013 dikarenakan kondisi alam seperti iklim dan cuaca, adanya curah hujan yang tinggi berpengaruh pada produktivitas kedelai. Ini disebabkan tanaman kedelai menghendaki kondisi tanah yang tidak terlalu basah, tetapi air tetap tersedia. Tanaman kedelai juga sangat peka terhadap perubahan iklim dan cuaca, curah hujan yang tinggi bisa mengakibatkan biji polong menjadi busuk.

Selain masalah anomaly cuaca, dari segi faktor biaya produksi, lahan yang digunakan usahatani kedelai adalah lahan sewa, lahan milik sendiri atau gabungan dari keduanya. Dan kebanyakan petani melakukan usahanya dari hasil sewa. Sedangkan luas tanah yang dimiliki perorangan biasanya antara 0,3 hektar hingga 0,5 hektar. Bahkan banyak yang di bawah 0,25 hektar. Padahal, menurut hasil analisis ekonomi sederhana, luas kepemilikan lahan yang mampu menguntungkan minimal 2 hektar.

Kabupaten Grobogan adalah sentra produksi kedelai Jawa Tengah, namun kedelai hanya berfungsi sebagai tanaman sela. Sebagai tanaman sela, tanaman kedelai lokal ternyata harus bersaing dengan dominasi tanaman jagung dan padi. Produksi jagung hibrida Grobogan tahun 2013 diperkirakan tidak kurang dari 600.000 ton. Jagung Grobogan telah masuk dalam jerat MNC benih asing. Saat ini tidak kurang dari 15 jenis varietas jagung hibrida membanjiri Grobogan, antara lain hibrida produk perusahaan Monsanto, yang dikenal varietas DeKalb (DK) 77, DK 85, dan lainnya. Pemain lain yang berebut pangsa pasar benih di Kabupaten Grobogan adalah PT. DuPont Indonesia (Amerika Serikat) dengan benih jagung pioneer dan PT Syngenta Indonesia (Swiss) dengan benih NK. Diperkirakan lebih dari 90% petani jagung di sana menggunakan benih hibrida produksi asing (<http://www.gatra.com>).

Sejak reformasi dan diberlakukannya Undang Undang N0.22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, nampaknya sektor pertanian memang cenderung kurang diperhatikan. Upaya kemandirin pangan tidak diimbangi dengan pendidikan pertanian yang memadai untuk petani. Penyuluh pertanian diperlukan guna meningkatkan SDM pelaku pertanian dengan memberikan bimbingan pengetahuan, keterampilan, pengenalan paket teknologi dan inovasi baru di bidang pertanian. Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan menunjukkan kurangnya jumlah penyuluh pertanian. Sebagai contoh di daerah Kecamatan Palukulon yang mempunyai luas 13.364 Ha dan terbagi menjadi 13 desa hanya memiliki 1 Kepala UPTD (Unit

Pelaksana Teknis Dinas Pertanian) ,3 penyuluh pertanian dan 3 Tenaga harian THL –TBPP ( Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian ) .*Key Person*,Kepala Bidang Tanaman Pangan, Akhmad Zulfa Kamal mengakui bahwa untuk tenaga penyuluh pertanian memang sangat kurang, tenaga yang ada sudah mendekati masa pensiun, sedangkan kebijakan Dinas Pertanian adalah moratorium tenaga penyuluh pertanian.

Ketika kebijakan pertanian makin terpinggirkan, sementara penyuluh pertanian makin berkurang celah ini dimanfaatkan korporat raksasa seperti Syngenta yang ikut berperan memberikan pelatihan dan penyuluhan pertanian bagi petani Kabupaten Grobogan, khususnya pada budidaya tanaman jagung. Menariknya upaya MNC pangan ini justru disikapi dengan rasa syukur.Padahal ini adalah bentuk hegemoni secara holistik yang tidak disadari seperti kata Gramscy. Semakin lama , petani menjadi tergantung dengan benih asing dan alpa mengembangkan varietas lokal yang memiliki *local wisdom* karena tidak merusak lingkungan akibat penggunaan pupuk hibrida.Akibat yang lain adalah petani semakin tidak tertarik menjadikan kedelai sebagai tanaman utama, padahal menurut *key person*, pemilik Unit Dagang Sudjono , pasangan suami istri, Sudjono dan Nunung, produksi kedelai Grobogan sebenarnya sangat menjanjikan, mudah ditanam dan menghasilkan kualitas kedelai yang bagus. Bahkan menurut Nunung, bila panen raya kedelai, UD Sudjono bisa memasarkan kelebihan supply ini ke daerah lain seperti Pati, Blora, Demak, bahkan hingga Jawa Timur.

Menurunnya produksi kedelai tidak hanya pada tata produksi saja, kebijakan harga kedelai juga dirasakan terlalu pro pasar. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) kerap kali tidak konsisten .Akibatnya petani kedelai enggan menanam kedelai dan beralih ke tanaman pangan lainnya. Sebagai contoh petani di kecamatan Toroh biasanya menanam kedelai setelah padi di musim kemarau, namun karena HPP kedelai tidak menentu , petani beralih menanam jagung yang dianggap lebih menjanjikan. BULOG sejak dikurangi perannya oleh IMF ,mengaku tidak bisa melakukan pembelian kedelai lokal dari petani, sebab Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk kedelai seringkali dibawah harga jual petani yang saat ini berlaku di pasar.HPP ditentukan oleh Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).HPP kedelai saat ini sebesar Rp7.500 perkilogram.Sedangkan harga jual petani kedelai saat ini berfluktuasi antara Rp.8000 hingga Rp8.700 perkilogram.Kenaikan HPP ini diharapkan mampu menarik minat petani menanam kedelai. Hanya saja yang menjadi pertanyaan adalah, mampukan harga kedelai lokal bersaing dengan kedelai impor yang selalu jauh lebih murah ? Bila tidak ada rate harga yang sama, kedelai lokal nampaknya tidak mampu menahan gempuran hegemoni produsen kedelai dunia.

Dari segi tata niaga ,hegemoni neoliberalisme dalam bentuk korporat pangan ibarat gurita yang masuk ke segala elemen, masuk ke desa-desa. Kabupaten Grobogan sebenarnya memiliki varitas kedelai unggulan yaitu Varitas Kedelai Grobogan, di mana dari hasil penelitian memiliki kandungan protein lebih tinggi dari kedelai impor dan aman dikonsumsi karena bebas dari ancaman rekayasa genetika.Menurut data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan,varietas lokal ini mempunyai keunggulan umurnya lebih pendek, polongnya besar, dan tingkat kematangan polong dan daun bersamaan, jadi pada saat dipanen daun kedelai sudah rontok. Keunggulan inilah yang menarik minat peneliti untuk memurnikan varietas ini. Varietas kedelai dengan potensi hasil 3,40 t/ha ini telah diuji coba dengan rata-rata hasil 2,77 t/ha. Yang menarik meskipun Varietas Grobogan diupayakan sebagai varitas kedelai unggul nasional namun menurut

Kepala Bidang Tanaman Pangan, Akhmad Zulfa Kamal, Varietas Grobogan ini belum dipatenkan. Sudah ada upaya usulan paten sejak tahun 2008, namun hingga sekarang paten untuk varietas kedelai ini belum turun.

Sayangnya kedelai lokal di Kabupaten Grobogan tidak mampu bersaing dengan kedelai impor. Kedelai impor masih menjadi andalan PRIMKOPTI (Primer koperasi Tahu dan Tempe Indonesia) Kabupaten Grobogan, ini dikarenakan kedelai lokal Grobogan hanya terpenuhi saat panen raya, sedangkan pada saat yang lain kedelai tidak mencukupi. Tidak hanya kurangnya produksi, kedelai lokal dinilai terlalu banyak mengandung air, sehingga PRIMKOPTI tidak berani stok kedelai terlalu banyak karena takut tidak awet dan mudah busuk, berbeda dengan kedelai impor yang dinilai lebih kering dan awet. Akibatnya kedelai impor masih mendominasi pasar kedelai di Kabupaten Grobogan.

Pada dasarnya kedelai Varietas Grobogan dari segi ukuran sudah sebanding dengan kedelai varietas lama dan kedelai impor, namun kurangnya penggunaan kedelai Varietas Grobogan pada pengolahan tempe disebabkan tingkat sensorisnya berbeda. Inilah mengapa produsen tempe apabila menggunakan kedelai lokal cenderung kurang memakai kedelai varietas Grobogan. Menurut Ginting et.al (2009), ukuran biji kedelai merupakan faktor penentu kualitas tempe, terutama bobot dan volume tempe serta sifat sensorisnya. Varietas berbiji besar Burangrang, Bromo, dan Argomulyo (bobot 100 biji sekitar 15g), sesuai untuk bahan baku tempe. Kualitas tempennya (warna atau tingkatkecerahan, tekstur, aroma, dan rasa) relative sama dengan tempe dari kedelai impor, bahkan lebih baik karena kadar proteinnya lebih tinggi.

Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014 mengenai pencapaian swasembada kedelai tahun 2014, dimana kebijakan harga dasar dan proteksi harga kedelai serta kebijakan tarif impor kedelai mulai dicanangkan nampaknya belum memberikan dampak signifikan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor kedelai, khususnya Kabupaten Grobogan.

### **C. PENUTUP**

Seperti kita sadari, era globalisasi dengan rezim neoliberalismenya menyebabkan kelas yang berkuasa adalah kelas kapitalis internasional, dengan anggotanya adalah para pemilik modal, birokrat di negara maju dan tiga lembaga internasional, IMF, *World Bank* dan WTO. Blok *Trans-national Capitalis Class* ini melakukan hegemoni pada negara-negara dunia ketiga. Hegemoni pada Keohane dan Kindleberg menekankan pada kemampuan material, sementara *historical materialist* (Gramsci) melihat hegemoni sebagai soal ideologi, norma, nilai, dan daya sosial. Hegemoni neoliberalisme adalah gabungan dari dua ide, tidak hanya penetrasi dalam bidang material saja namun secara holistik, menyentuh semua aspek kehidupan.

Maka penguatan pertanian perdesaan seharusnya menjadi keniscayaan. Karena pangan kita juga bergantung pada ekonomi perdesaan. Kedelai sebagai komoditas pangan telah terjebak dalam jerat rezim neoliberalisme, terhegemoni oleh kekuatan pasar bebas. Sejak Indonesia masuk menjadi anggota WTO dan ditandatanganinya kesepakatan Lol dengan IMF, komoditas kedelai tidak bisa berswasembada. Padahal sebenarnya banyak daerah yang memiliki potensi untuk mengembangkan komoditas ini. Grobogan sebagai salah satu sentra komoditas kedelai dengan varietas unggulan namun pada kenyataannya Kabupaten Grobogan dalam penelitian ini juga tidak mampu lepas

dari jerat impor , belum mampu menjadikan komoditas kedelai lokal sebagai raja di tanah sendiri.

Inilah saatnya kedaulatan ekonomi seharusnya dikembalikan pada tatanan ekonomi Pancasila dengan ekonomi kerakyatannya yang berpihak pada rakyat. Kebijakan pertanian Indonesia hendaknya meletakkan kesejahteraan petani sebagai tujuan utama dan bukannya mensejahterakan kartel pangan. Diperlukan *political will* dari pemerintah akan pentingnya revitalisasi peran negara dalam diplomasi perundingan perdagangan internasional yang terkait dengan pertanian. Karena ada korelasi antara kedaulatan pangan dan kedaulatan negara. Kedaulatan pangan merupakan prasyarat dari ketahanan pangan (*food Security*). Terciptanya ketahanan pangan berawal bila bangsa dan rakyatnya memiliki kedaulatan atas proses produksi dan konsumsinya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agreement of Agriculture* ( 2013) dalam [http://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/14-ag.pdf](http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/14-ag.pdf) diunduh pada tanggal 2 Oktober pk 23.00 WIB
- Cahyadi, Wisnu. (2007). *Kedelai Khasiat dan Teknologi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Deliarnov. (2006). *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Gilpin, Robert. (2001). *Global Political Economy*. New Jersey: Princeton University Press
- Dominasi-benih-asing-mengancam-kedaulatan-pangan*. dalam <http://www.gatra.com/fokus-berita/44364- html> diunduh tanggal 23 Mei 2014 pk 20.30 WIB
- Faruk . (2005). *Pengantar Sosiologi Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ginting, Erliana., Sri Satya Antarlina, dan Sri Widowati. 2009. *Varietas Unggul Kedelai Untuk Bahan Baku Industri Pangan*. *Jurnal Litbang Pertanian*, 28(3) 79-87
- Impor-kedelai-untuk-tahu tempe* (2013) dalam <http://finance.detik.com/read//08/30> diunduh tanggal 1 Oktober pk 18.00 WIB
- Jemadu, Aleksius. (2008). *Politik Global dalam teori dan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Keohane, Robert. (1984). *After Hegemony : Cooperation and Discord in the World Political Economy*. New Jersey : Princenton University Press
- Peet, Richard. (2009). *Unholy Trinity: the IMF, World Bank and WTO*. New York: Zad Boosk Ltd
- Produksi-dan-Kualitas-Kedelai-Tinggi-tapi-Tetap-Impor* (2013) dalam <http://www.metrotvnews.com> diunduh pada tanggal 25 September 2013 pukul 22.00 WIB
- Rahardjo, M. Dawam. (2012). ***Pembangunan Pascamodernis: esai-esai ekonomi-politik***, Penyunting: Tarli Nugroho. Sleman : INSIST Press dan INFID.
- Rizky, et al. (2008). *Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia*. Jakarta : E Publishing
- Soesastro et al. (2005). *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir (1997-2005 ) Krisis dan Pemulihan Ekonomi*. Yogyakarta : Kanisius-ISEI
- Stiglitz, E Joseph (2003 ) *Globalization and Its Discontents* .USA :W. W. Norton & Company
- Tabel Luas Panen dan Produksi kedelai di Kabupaten Grobogan dan Jawa Tengah tahun 2009s.d 2013* (2014). Dinas Pertanian TPH Kab Grobogan dan Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah
- UUD 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* dalam Wikipedia. [http://id..org/wiki/Undang-Undang Dasar 1945](http://id..org/wiki/Undang-Undang_Dasar_1945) diunduh pada 2 Oktober 2013 pk 21.00 WIB
- Wibowo, I. (2010). *Negara Centeng: Negara dan Saudagar di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Kanisius